

**ANALISIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH SEBAGAI PENGGERAK
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH**

(Studi Kasus Pada Kota Mojokerto)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Ortina Rezki

105020107111030



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2014

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

ArtikelJurnaldenganjudul :

**ANALISIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH SEBAGAI PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus Pada Kota Mojokerto)**

Yang disusunoleh :

Nama : Ortina Rezki
NIM : 105020107111030
Fakultas : EkonomidanBisnis
Jurusan : S1 IlmuEkonomi

BahwaartikelJurnaltersebutdibuatsebagai*persyaratanutjianskripsi* yang
dipertahankandi depanDewanPengujipadatanggal7 Mei 2014.

Malang, 7 Mei 2014

DosenPembimbing,



Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE., MS
NIP.19520415 197412 1 001

**Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sebagai Penggerak
Pertumbuhan Ekonomi Daerah
(Studi kasus pada Kota Mojokerto)**

Ortina Rezki

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: tenz.lays@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu jumlah keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Mojokerto semakin meningkat dan kontribusi terhadap PDRB terus meningkat serta berbagai peran strategis dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah, namun Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga dihadapkan berbagai permasalahan yang bersumber dari kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya pemberdayaan dari pemerintah daerah untuk menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing tinggi, dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan serta mampu berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah seperti permodalan, pelatihan, pemasaran, sarana prasarana, dan iklim usaha yang kondusif dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menjadikan usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing tinggi, berkembang secara berkelanjutan, dan memberikan andil dalam perekonomian daerah.

Kata Kunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemberdayaan

A. PENDAHULUAN

Kota Mojokerto merupakan kota yang terletak cukup strategis, 50 km arah barat Kota Surabaya, daerah ini menjadi *hinterland* kota metropolitan dan termasuk dalam Gerbang Kertassila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Daerah-daerah ini merupakan kelompok kawasan yang menyangga Kota Surabaya. Dari data keragaan UMKM unggulan per 30 Juni 2013 yang dikutip dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, Kota Mojokerto merupakan peringkat ketiga tertinggi dari daftar UMKM unggulan provinsi Jawa Timur. Dilihat dari kondisi perekonomian, daerah Kota Mojokerto dari tahun 2009-2011 terus mengalami peningkatan. Dengan jumlah penduduk 134.222 jiwa pada tahun 2011 Kota Mojokerto menjadi salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 8.152 penduduk per kilometer persegi. Melihat kondisi ini maka pengembangan industri besar sangat tidak memungkinkan, sehingga melihat potensi yang ada maka pengembangan UMKM menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kota Mojokerto bersama *stakeholder* yang ada untuk mengembangkan perekonomian masyarakat bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1: Daftar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2012

Jenis Usaha	2009	2010	2011	2012	Jumlah
Alas kaki	2	7	37	3	49
Konveksi	22	22	16	16	76
Batik tulis	1	0	3	1	5
Pengrajin	4	3	11	4	22
Peternak	12	13	5	4	34
Dagang	15	17	54	31	117
Salon	12	17	4	10	43
Bengkel	5	15	3	8	31
Lain – lain	54	44	7	86	191
Total	133	148	152	165	598

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

Dapat dilihat kondisi UMKM kota Mojokerto pada tabel 1, dimana dari tahun 2009-2012 jumlah UMKM semakin meningkat dengan jumlah pada setiap sektor usaha berfluktuatif setiap tahun. Sektor dagang menjadi sektor terbesar pada UMKM yang terdapat di Kota Mojokerto. Maka tidak diragukan lagi peranannya yang dapat meningkatkan pendapatan pada masyarakat khususnya masyarakat kelompok rendah dan telah banyak menyerap tenaga kerja bahkan telah memberikan andil bagi Kota Mojokerto terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Melihat keberadaan UMKM di Kota Mojokerto yang semakin meningkat, Berbagai peran strategis dimiliki sektor UMKM, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan yang pada umumnya bersumber dari kelemahan yang terjadi dalam diri UMKM. Menurut Sukidjo (2004) permasalahan UMKM antara lain kekurangan dana baik untuk modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran yang disebabkan oleh keterbatasan informasi mengenai perubahan dan peluang pasar, kesulitan dalam pengadaan bahan baku khususnya bahan baku yang masih harus diimpor selain waktu yang cukup lama dan harganya pun juga mahal, keterampilan sumber daya manusia (pekerja dan manajer) masih rendah, teknologi yang digunakan masih rendah yang ditandai oleh peralatan produksi yang digunakan masih tradisional, kesulitan dalam administrasi pembukuan.

Mengingat keberadaan UMKM sangat penting dipertahankan guna membantu mengatasi berbagai masalah-masalah ekonomi dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan upaya mengatasi pengangguran serta pengentasan kemiskinan, maka UMKM sangat perlu untuk diberdayakan oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga pada pemerintah daerah diharapkan dapat memberdayakan UMKM secara optimal karena setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009, pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Bantuan modal;
- b. Pembinaan manajemen;
- c. Bimbingan teknis;
- d. Pendidikan dan pelatihan;
- e. Pemasaran produk;
- f. Pendaftaran usaha;
- g. Sertifikasi penduduk;
- h. Ekspor-impor;
- i. Perpajakan; dan
- j. Fasilitasi dan pembinaan di bidang hak atas kekayaan intelektual.

Dengan perhatian dan dukungan dari pemerintah yang diberikan maka pemberdayaan UMKM dapat diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Sedangkan pemberdayaan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan merupakan upaya mengembangkan, memandirikan dan membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Itu berarti bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan upaya untuk mengembangkan dan memandirikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Ke-mandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Terjadinyakeberdayaanpadaempataspaktersebut (afektif, kognitifdanpsikomotorik) akandapatmemberikankontribusi padaterciptanyakemandirianmasyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakatanterjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapidengankecakapan-keterampilan yang memadai, diperkuatoleh rasa memerlukanpembangunanandanperilakusadarakankebutuhantersebut. (AmbarTeguh S, 2004:80-81)

SedangkanmenurutPeraturan Daerah Kota MojokertoNomor 7 Tahun 2009 TentangPemberdayaan Usaha Mikro, Kecil danMenengahTujuandaripemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, danMenengahsebagai berikut:

- a. Mewujudkanstrukturperekonomiannasional yang seimbang, berkembang, danberkeadilan;
- b. Menumbuhkandanmengembangkankemampuan Usaha Mikro, Kecil, danMenengahmenjadiusaha yang tangguhdanmandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, danMenengahdalam pembangunan daerah, penciptaanlapangan kerja, pemerataanpendapatan, pertumbuhanekonomi, danpengentasanrakyatdarikemiskinan.

Tahap-tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodingningrat (1999: 41) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian. (Ambar Teguh S, 2004:82-83)

RPJMD (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH) Kota Mojokerto 2009 – 2014

Agenda pembangunan ekonomi Kota Mojokertotahun 2009-2014 terdiridaritujuan, sasaran, strategidankebijakan.Berikut rinciannya:

- a. Tujuan
Berikutmerupakan tujuandari agenda pengembangan Kota Mojokerto 2009-2014 :
 1. Meningkatkan PDRB dan income per kapita
 2. Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi
 3. Meningkatkan daya saing ekonomi
 4. Mengembangkan infrastruktur perekonomian
- b. Sasaran
Berikutmerupakan sasaran dari agenda pengembangan Kota Mojokerto 2009-2014 :
 1. Meningkatkan sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB
 2. Meningkatkan income per kapita penduduk
 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah
 4. Meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi
 5. Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha
 6. Keberpihakan pada usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah
 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk lokal
 8. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk lokal
 9. Meningkatkan saran dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi
 10. Penataan pedagang kaki lima (PKL)
- c. Strategi
Berikutmerupakan strategi dari agenda pengembangan Kota Mojokerto 2009-2014 :
 1. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif
 2. Adanya komitmen untuk berpihak pada usaha ekonomi mikro kecil menengah

3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga ekonomi
4. Memfasilitasi promosi, peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal
5. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana ekonomi

d. Kebijakan

Berikut merupakan kebijakan dari agenda pengembangan Kota Mojokerto 2009-2014 :

1. Peningkatan layanan perijinan usaha
2. Pengembangan pertanian berwawasan agribisnis
3. Menumbuhkembangkan koperasi dan asosiasi-asosiasi usaha
4. Peningkatan SDM pelaku usaha
5. Penguatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi
6. Pendirian BUMD bidang perbankan dan tauperkreditasi
7. Mendorong peningkatan mutu produk
8. Mendorong legalitas lembaga sertifikasi produk lokal
9. Peningkatan promosi produk unggulan daerah
10. Fasilitas sentra industri kecil
11. Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya
12. Penataan PKL

UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar; (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pemberdayaan UMKM akan menggerakkan sektor riil, karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Dengan kata lain pemberdayaan UMKM akan memberikan perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan sehingga dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Anonymous, 2003).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau frekuensi penyebaran suatu gejala yang lain di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2002:6) penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya akan mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan kajian hipotesa.

Jenis, Sumber Data dan Penentuan Informan

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong (2002:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan untuk jenis data, dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Adapun sumber informan dalam penelitian ini yaitu yang pertama pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto alasan pemilihan informan tersebut dikarenakan informan merupakan pengambil kebijakan terkait dengan upaya peningkatan UMKM di Kota Mojokerto dan informan kedua yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Mojokerto dengan pertimbangan bahwa informan merasakan secara langsung fasilitas yang yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka peningkatan UMKM.

Metode Pengumpulan Data, Analisis Data dan Keabsahan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Miles dan Huberman (1992:72) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengujian

keabsahan data dengan teknik pemeriksaan menurut Moelong (2002: 327) yaitu ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial dan uraian rinci.

D. PEMBAHASAN

Berikut merupakan daftar informan dalam penelitian yang digunakan untuk pengambilan data primer. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang telah ditentukan didalam metode penelitian. Data informan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 : Daftar Informan

No.	Nama Pemilik Usaha	Umur(Tahun)	Jenis Usaha
1.	Khoiruman	44	Alas kaki
2.	Mas Roro Astati	68	Konveksi
3.	Ernawati	37	Batik Tulis
4.	H. Djauhari (SSBT)	84	Pengrajin Kapal Finisi
5.	Krisna (Bo Liem Ir)	33	Makanan khas Onde-onde
6.	Netti Yulia	59	Tas Rajut
7.	Rini (Rizky Souvenir)	43	Boneka Gypsum
8.	Firman Bagus	37	Cetakan kue
9.	Bpk. Gufron	44	Ternak Ayam
10.	Oni (Wacana Sejati)	43	Percetakan Buku

Sumber: Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Mojokerto.

Permasalahan Yang Dihadapi UMKM Kota Mojokerto

Masalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah manapun sebenarnya hampir sama sekitar mengenai tentang produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan sebagainya. Berdasarkan hasil survey lapangan dan wawancara dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) \didapat kesimpulan permasalahan sebagai berikut:

1. Masalah Bahan Baku

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang produknya melalui pesanan seperti usaha batik tulis dan konveksi yang berasal dari kain, produksinya tergantung dari pesanan bahan baku itu sendiri. Tentunya untuk produk yang melalui pesanan, para pengusaha batik tulis dan konveksi harus mempertimbangkan waktu pemesanan, kreasi atau ide tentang motif produk, kualitas produk dan sebagainya yang akan menarik bagi pembeli sehingga produksi tetap berjalan.

2. Masalah Permodalan

Masalah yang dianggap klasik bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada umumnya adalah masalah permodalan. Memang dalam kenyataan modal usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah relative kecil, namun untuk bisa memajukan dan mengembangkan usahanya diperlukan modal yang cukup untuk membeli alat-alat produksi agar mampu menghasilkan output yang maksimal dan lebih berkualitas serta untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.

3. Masalah Produksi

Pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah unggul atau dapat dikatakan menengah dalam produksi seringkali menjadi permasalahan. Dari salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) unggulan yaitu bapak Djauhari dengan usaha pengrajin kapal finisi, saat saya wawancara mengatakan,

“Seringkali masalah dalam produksi mbak. Karena usaha saya ini termasuk unggulan dan sudah punya banyak konsumen, nah ketika konsumen memesan barang dengan jumlah yang banyak disitu saya sering kesulitan dalam memenuhi jumlah barang yang dipesan. Ya karena tenaga kerjanya juga terbatas. Namanya juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semua serba terbatas”.

Sangat disayangkan ketika usaha yang dirintis sudah berkembang bahkan menjadi usaha unggulan di daerahnya mengalami kekecewaan terhadap konsumen hanya karena tidak mampu memenuhi jumlah barang yang dipesan oleh konsumen.

4. Masalah Pemasaran

Ada beberapa produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang penjualannya harus keluar daerah seperti industri sepatu, hasil pertanian seperti ternak ikan lele, industri rumah tangga dan beberapa souvenir yang perlu adanya ikut campur tangan Pemerintah Daerah untuk mempromosikan produknya.

5. Masalah Lokasi Penjualan

Berikut merupakan Ibu Netti Yulia dengan usaha tas rajutnya saat wawancara mengatakan,

“Lokasi penjualan ya di rumah ini saja, kalau membuka toko pasti biayanya juga lebih besar ya mbak, belum untuk nyewa tempat, belum juga untuk karyawan toko, jadi di rumah sendiri lebih hemat dan selain itu aksesnya juga mudah langsung sama tempat produksinya. Butuh apa tinggal ngambil”.

Dari penyampaian diatas hal tersebut menjadi permasalahan ketika lokasi usaha yang mereka tempati berada jauh dari tempat berjualan yang strategis. Pada akhirnya orang kurang begitu tahu ternyata terdapat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut dan akan berdampak pada penjualan atau pemasaran pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) itu sendiri.

Upaya Pemberdayaan UMKM Oleh Pemerintah Daerah

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) selama ini adalah:

1. Permodalan

Dalam hal pemodalannya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) memberikan bantuan berupa pinjaman yang disebut dengan pinjaman perkuatan modal. Besar kecilnya dana yang dipinjam tergantung juga pada besar kecilnya usaha untuk lebih efektif dalam pemanfaatan pinjaman modal. Bantuan pinjaman perkuatan modal ini tidak ada bunga untuk pengembalian pinjaman namun pengembalian pinjaman harus dikembalikan dengan jangka waktu 10 bulan dari mulai ketika meminjam.

2. Pelatihan

Program pelatihan yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) diadakan sejak tahun 2007 dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih terampil dan lebih kreatif. Dalam pelatihan pemerintah daerah mendatangkan pelatih dari pengusaha yang sudah berpengalaman dibidangnya dan para pelaku UMKM tidak dipungut biaya untuk mengikuti pelatihan tersebut.

3. Pemasaran

Di beberapa daerah, masalah pemasaran menjadi perhatian utama, khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan produk lokal. Beberapa dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tradisional masih menggunakan metode pemasaran kadaluarsa seperti memasarkan produknya hanya dari mulut ke mulut saja. Hal tersebut bisa membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini tidak mengalami perkembangan yang pesat atau bahkan bisa menurun. Maka sebab itu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kota Mojokerto berupaya untuk mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lewat beberapa program pameran-pameran yang digelar di dalam daerah maupun luar daerah. Dengan begitu upaya mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pemasaran inovatif dan modern bisa membantu meraih kembali keuntungan pasar.

4. Sarana dan prasarana usaha yg memadai

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kota Mojokerto memiliki Klinik UMKM yang merupakan sarana dan prasarana bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Klinik umkm ini menyediakan beberapa layanan yaitu:

1. Layanan Konsultasi Bisnis,
2. Layanan Informasi Bisnis,

3. Layanan Advokasi dan Pendamping,
4. Layanan Short Course,
5. Layanan Akses Pembiayaan,
6. Layanan Akses Pemasaran Produk UMKM.

Dengan adanya Klinik UMKM ini diharapkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menggunakan secara maksimal sarana dan prasarana yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) guna mengembangkan usaha yang digelutinya.

5. Terciptanya iklim yang kondusif

Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kota untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluasluasnya.

Menurut peraturan daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, program ini bertujuan memfasilitasi terciptanya lingkungan usaha bagi UMKM melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, pendaftaran dan atau perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan perlindungan dan dukungan kelembagaan.

Kendala Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM

Berikut pernyataan dari Bapak Zainul Arifin, SE selaku kepala seksi bina UMKM saat wawancara sebagai berikut,

“Yang masih menjadi kendala utama dalam memberdayakan UMKM sampai saat ini ya modal. Gimana tidak, untuk mengadakan program-program kegiatan UMKM yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) pasti membutuhkan modal atau dana. Seperti halnya pada saat mengadakan pelatihan, kami pasti membutuhkan dana untuk mendatangkan mentor yang akan menjadi pengajar dalam pelatihan. Dalam pemasaran, untuk mengadakan program kegiatan pameran pun juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sekalipun kegiatan pameran yang mendapat undangan dari beberapa daerah saja pasti membutuhkan dana entah itu untuk transportasi, konsumsi, dan lain-lain. Hanya modal yang sampai sekarang masih menjadi kendala, selain itu kami merasa tidak ada kendala yang cukup serius”.

Terbatasnya anggaran yang diperuntukkan program kegiatan khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program yang dilakukan atau bisa jadi kurang optimal. Maka dari itu untuk membantu peningkatan permodalannya pemerintah daerah tidak hanya dari dana APBD saja tapi seharusnya melakukan kerjasama baik dengan pihak perbankan maupun non bank dalam akses permodalan untuk memperlancar program-program kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Gambaran Tingkat Pemberdayaan UMKM Oleh Pemerintah Daerah

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam pemberdayaan UMKM pemerintah daerah Kota Mojokerto memiliki lima program pemberdayaan yaitu permodalan, pelatihan, pemasaran, sarana prasarana dan Iklim usaha. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah daerah Kota Mojokerto lebih prioritas kepada apa yang dibutuhkan oleh para UMKM dalam mengembangkan usahanya apakah dari permodalan, pelatihan, pemeran, sarana prasarana dan iklim usaha karena pastinya setiap UMKM memiliki permasalahan yang berbeda-beda dalam mengembangkan usahanya. Jadi peran pemerintah daerah Kota Mojokerto dalam pemberdayaan UMKM ini bukan yang secara keseluruhan turun tangan dalam mengembangkan usaha yang awal mulanya usaha kecil menjadi usaha besar karena sangat tidak mungkin dilakukan apabila pemerintah daerah secara keseluruhan berperan dalam mengembangkan UMKM mengingat jumlah UMKM Kota Mojokerto yang tidak sedikit dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bagaimanapun juga setiap UMKM pasti memiliki strategi masing-masing dalam mengembangkan usahanya. Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menjadikan usaha yang mandiri dan berkembang dalam menggerakkan kegiatan ekonomi dunia usaha.

Dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Mojokerto, dari mulai permodalan, pelatihan, pemasaran, sarana dan prasarana dan iklim usaha maka sudah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Mojokerto. Upaya permodalan yaitu perkuatan modal yang dilakukan pemerintah daerah Kota Mojokerto diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini sangat membantu bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mojokerto saat wawancara,

“Sampai sekarang saya kalau butuh modal untuk membeli kebutuhan-kebutuhan usaha saya yang jumlahnya tidak sedikit misalnya membeli mesin untuk menambah jumlah produksi, saya selalu mengajukan bantuan pinjaman perkuatan modal kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG). Bantuan pinjaman ini sangat membantu dalam mengembangkan usaha saya selama ini.”

Dari pengakuan Ibu Mas Roro pelaku usaha konveksi ini dapat diartikan bahwa upaya permodalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya.

Pelatihan juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih terampil, kreatif, dan memiliki ilmu baru sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha. Ibu Netty pelaku usaha tas rajut mengatakan,

“Saya sering ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan sama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG). Ya dari situ saya jadi lebih tau model tas yang lagi digemari, tapi nggak Cuma pelatihan usaha tas rajut aja. Pelatihannya juga mengajarkan berbagai macam usaha lainnya. Sehingga kita lebih banyak ilmu yang didapat ketika ikut pelatihan, malahan biasanya ketika usai pelatihan mendapatkan beberapa bahan dan peralatan untuk dicoba dirumah.”

Begitulah pengalaman Ibu Netty ketika mengikuti program pelatihan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG).

Begitu juga dengan program pameran yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) sebagai upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pameran merupakan salah satu cara pemasaran untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hampir semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pernah mengikuti pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) karena pameran tersebut akan membuat usaha yang dirintis dapat lebih dikenal. Tidak hanya dikenal saja, tapi juga semakin luasnya jaringan pemasarannya dengan bertemunya pengusaha-pengusaha yang sudah lebih maju. Bahkan dengan mengikuti pameran, mereka pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak jarang diajak bekerjasama dalam mengembangkan usaha. Berikut merupakan pernyataan dari Bapak Khoiruman pelaku usaha alas kaki,

“Saya sering ikut pameran yang diadakan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG), karena sering ikut jadi saya sering diundang kalau ada pameran di luar kota. Pameran ini sangat perlu ya untuk UMKM selain untuk memperkenalkan produk, tetapi juga sebagai peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Banyak informasi atau sharing dari sesama pelaku usaha. Dan dampak dari pameran ini yang dulunya saya hanya menerima konsumen dari daerah saja, kini saya mendapat konsumen dari luar daerah juga. Kegiatan pameran ini sangat bermanfaat untuk perkembangan UMKM.”

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) juga menyediakan sarana dan prasarana yaitu Klinik UMKM dengan berbagai pelayanan yang diberikan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Klinik umkm ini juga sangat membantu ketika para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami kesulitan atau permasalahan

dalam mengembangkan usahanya. Namun masih ada beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memang belum tahu benar kegunaan dari Klinik UMKM. Ini merupakan tugas pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) untuk lebih menginformasikan atau mensosialisasikan program yang sudah dilakukan kepada para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar program ini dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menciptakan suasana dan iklim usaha yang kondusif akan memungkinkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang. Iklim usaha ini merupakan kondisi yang diupayakan pemerintah daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Namun Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) tidak begitu saja memberikan program-program kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetapi juga memonitor tumbuh kembang UMKM dari upaya-upaya yang sudah dilakukan. Seperti dalam upaya permodalan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) melihat kondisi usaha sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan perkuatan modal tersebut. Berikut pernyataan dari Bapak Zainul Arifin, SE selaku kepala seksi bina UMKM saat wawancara,

“Dari bantuan permodalan ini tentunya kami juga memonitor tumbuh kembang usaha yang mendapat bantuan permodalan, tidak serta merta mengajukan perkuatan modal, mendapat modal dan mampu mengembalikan modal begitu saja namun ada pertanggungjawaban sendiri atas modal yang sudah diberikan. Apakah setelah mendapatkan perkuatan modal, perkembangan usaha semakin maju atau bahkan turun. Nah dari situlah nanti kita dapat mengukur oh ternyata program bantuan perkuatan modal ini sudah tepat dan bermanfaat atau bahkan kurang tepat. UMKM di Kota Mojokerto sendiri yang mendapat perkuatan modal, delapan dari sepuluh perkembangan usahanya mengalami peningkatan.”

Dari pernyataan diatas, dapat diartikan program bantuan perkuatan modal ini sudah berjalan sangat baik dan bermanfaat bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk dapat mengembangkan usahanya yang terlihat dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendapat perkuatan modal kebanyakan mengalami perkembangan dalam usahanya, namun tidak dipungkiri ada sedikit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dengan bantuan perkuatan modal ini tidak bisa berkembang atau bisa dibilang gulung tikar. Hal ini bisa terjadi karena pelaku usaha tidak dapat mengelola keuangan dengan baik dalam usaha yang dirintisnya yang mengakibatkan tidak maksimalnya penggunaan bantuan perkuatan modal. Maka dari itu dengan mendapatkan bantuan perkuatan modal tersebut pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus bisa memanfaatkan dan mengelola modal ini dengan baik dalam mengembangkan usahanya.

Bapak Zainul Arifin, SE selaku kepala seksi bina UMKM saat wawancara juga mengatakan bahwa,

“Sama halnya pada program pelatihan, pameran, sarana dan prasarana dan iklim usaha yang kondusif, dengan terlaksananya program-program tersebut rata-rata Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam usahanya.”

Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Mojokerto menggunakan pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa UMKM tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan UMKM harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

Pertama, upaya itu harus terarah (targetted). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh pelaku UMKM yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan pelaku UMKM yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan

kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) UMKM dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri UMKM sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara keseluruhan sudah diberdayakan dengan baik dengan program-program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) yang menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing tinggi, dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan serta mampu berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Usaha Mikro Kecil Menengah Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Selama empat tahun terakhir ini dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Mojokerto mengalami peningkatan yang cukup berarti. Kenyataan ini memberikan indikasi bahwa perekonomian Kota Mojokerto secara nominal terus meningkat dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 : **Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2009-2012(%)**

Sektor	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Pertanian	2,24	-0,49	3,71	2,26
Pertambangan & Energi	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	0,47	2,75	3,33	6,23
Listrik, Gas & Air bersih	4,07	6,97	9,11	7,05
Konstruksi	6,88	5,70	9,09	7,21
Perdng, Hotel & Restoran	4,42	7,59	7,19	8,93
Pengangkutan & Komunikasi	9,42	7,76	10,33	7,42
Keuangan, Persewaan & Jasa prs.	6,38	6,56	5,54	6,65
Jasa-jasa	7,10	4,87	5,58	4,56
PDRB	5,14	6,09	6,68	7,11

Sumber : BPS Kota Mojokerto

Dari sektor Industri Pengolahan selama periode tahun 2009-2012 selalu mengalami pertumbuhan positif, bahkan pada tahun 2012 tumbuh pesat sebesar 6,23% dibandingkan pada tahun 2011 hanya mencapai 3,33%. Pada tahun 2012 semua sub sektor juga mengalami pertumbuhan positif, tiga sub sektor Industri Pengolahan yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu sub sektor Industri Pengolahan Kertas dan Barang Cetakan 8,04%, sub sektor Industri Pengolahan Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki sebesar 6,87% serta sub sektor Industri Pengolahan Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet sebesar 6,59%. Pertumbuhan positif pada sektor Industri Pengolahan tahun 2012 tentunya tidak terlepas dari dampak kerja keras upaya pemerintah daerah Kota Mojokerto.

Terlepas adanya angka pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor yang masih relative rendah di Kota Mojokerto, serta kecenderungan laju pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebenarnya hal itu memberikan pemicu yang baik bagi proses

peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk tahun kedepan. Ada beberapa alasan yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto yaitu sebagai daerah otonom Kota Mojokerto banyak melakukan pembangunan disemua sektor, letak Kota Mojokerto yang strategis karena berdekatan dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya yang sebagai jalur lintas Surabaya menuju daerah lain yang ada di Jawa Timur, Kota Mojokerto merupakan pintu masuk terhadap arus lalu lintas barang sehingga hal ini membawa dampak positif terhadap membaiknya kondisi perekonomian Kota Mojokerto di masa mendatang.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pemerintah daerah Kota Mojokerto, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Mojokerto dari Tahun 2009 sampai sekarang adalah bantuan perkuatan modal, pelatihan, pameran, sarana dan prasarana dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
2. Dengan adanya upaya bantuan perkuatan modal dari pemerintah daerah dapat memudahkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengakses permodalan dengan mudah tanpa ada beban bunga untuk pengembaliannya.
3. Pelatihan juga merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mampu memberikan ilmu baru untuk lebih kreatif dan terampil bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha. Program ini sudah terlaksana dengan baik bagi para usaha dengan berbagai bidang usaha yang ditekuni.
4. Begitu juga dengan program pameran yang dilakukan pemerintah daerah, hampir semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pernah mengikuti pameran karena membuat usaha yang dirintis dapat lebih dikenal dan sebagai peningkatan sistem serta jaringan informasi perdagangan. Banyak informasi atau sharing yang didapat dengan sesama pelaku usaha.
5. Pemerintah daerah juga menyediakan sarana dan prasarana yaitu Klinik UMKM dengan berbagai pelayanan yang diberikan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Klinik umkm ini juga sangat membantu ketika para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami kesulitan atau permasalahan dalam mengembangkan usahanya. Kurangnya Informasi membuat beberapa pelaku UMKM kurang mengetahui tentang Klinik UMKM.
6. Menciptakan suasana dan iklim usaha yang kondusif akan memungkinkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang. Kondisi yang diupayakan pemerintah daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
7. Dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan secara keseluruhan sudah diberdayakan dengan baik. Sehingga menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing tinggi, dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan serta mampu berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Saran

Di akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Kendala modal dalam pemberdayaan UMKM yang dialami, pemerintah daerah sebaiknya melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) meskipun dengan adanya bunga yang rendah namun hal itu dapat memperlancar terlaksananya program-program kegiatan pemberdayaan UMKM. Pemerintah daerah dirasa perlu juga mengadakan pelatihan teknologi bagi

para pelaku UMKM seperti pelatihan teknologi dalam produksi dan teknologi dalam pemasaran, hal ini bertujuan untuk memberikan ilmu baru agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang kian semakin maju. Pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) juga harus lebih aktif dalam mensosialisasikan program-program kegiatan yang mereka berikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik pada usaha yang unggulan maupun usaha mikro.

2. Bagi Pelaku UMKM

Dalam pemasaran, UMKM tidak hanya mengandalkan pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah daerah saja, tetapi untuk memperluas wilayah atau daerah pemasarannya dapat melalui internet maka dari itu perlunya para pelaku UMKM memahami perkembangan teknologi saat ini sehingga konsep pemasaran dan promosi produk yang dilaksanakan dapat tersebar luas dan lebih menarik banyak konsumen. Para pelaku UMKM juga hendaknya ikut berpartisipasi aktif dalam semua program kegiatan yang diberikan, tidak hanya pada kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan saja karena hal itu akan menunjang tumbuh kembang usahanya. Untuk UMKM yang sudah diberdayakan dengan baik harus selalu menjaga kondisi usahanya mulai dari kualitas produk, kreativitas dan inovatif baru pada produk yang dihasilkan agar terus eksis dalam dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2003. *Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2009. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. 2009. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Mojokerto Tahun 2009-2014.
- Gunawan, Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru)*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Medika.
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto No.7 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.